



MEMBANGUN GENERASI ANTI KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI

Allisya Aurel Putri¹, Calysta Zahra Elysia², Eka Setiawati³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Komputer, Informatika, Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

E-mail : allisyaarelputri@gmail.com¹, cacalystazahra@gmail.com²,

ekaasetiaawati@gmail.com³

Abstrak Korupsi merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi negara, tetapi juga merusak moralitas, kepercayaan publik, serta kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum, melainkan juga membutuhkan langkah preventif yang sistematis dan berkelanjutan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan karakter, khususnya di lingkungan perguruan tinggi sebagai lembaga yang berperan dalam mencetak generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendidikan karakter dapat berkontribusi dalam membangun generasi anti korupsi di perguruan tinggi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur, yang mengkaji berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, serta dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan karakter memiliki peran yang sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta kepedulian sosial kepada mahasiswa. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi utama dalam membentuk sikap dan perilaku anti korupsi. Implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui integrasi dalam kurikulum pembelajaran, penguatan budaya akademik yang berintegritas, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta keteladanan dari dosen dan pimpinan institusi. Selain itu, lingkungan kampus yang kondusif dan berlandaskan nilai-nilai etika juga menjadi faktor penting dalam mendukung internalisasi karakter mahasiswa. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, perguruan tinggi diharapkan mampu mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas tinggi dan komitmen kuat dalam mencegah serta melawan praktik korupsi di berbagai sektor kehidupan.

Kata kunci: Pendidikan Karakter, Anti Korupsi, Perguruan Tinggi, Integritas, Pencegahan Korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan fundamental yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya terjadi dalam lingkup pemerintahan pusat, tetapi juga meluas hingga ke pemerintah daerah serta berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi telah berkembang menjadi persoalan yang bersifat sistemik dan terstruktur, sehingga sulit diberantas hanya dengan pendekatan hukum semata.¹

¹ Khairudin, dkk., Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia (2025), hlm. 2.

Data dan berbagai kajian menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, bahkan cenderung mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa berbagai upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan belum mampu menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh. Korupsi tidak lagi dipahami hanya sebagai tindakan individu yang menyimpang, tetapi juga sebagai akibat dari kegagalan sistem dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.²

Lebih jauh, korupsi juga berkaitan erat dengan rendahnya integritas moral dan lemahnya internalisasi nilai-nilai etika dalam kehidupan masyarakat. Banyak pelaku korupsi berasal dari kalangan terdidik dan memiliki posisi strategis dalam pemerintahan maupun lembaga publik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan formal yang selama ini diterapkan belum sepenuhnya berhasil membentuk karakter individu yang berintegritas.³

Dalam perspektif hukum, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang sangat luas dan merusak berbagai aspek kehidupan. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan angka kemiskinan, merusak sistem sosial, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bahkan, korupsi juga dapat mengancam stabilitas nasional dan keberlanjutan pembangunan.⁴

Selama ini, upaya pemberantasan korupsi lebih banyak difokuskan pada pendekatan represif melalui penegakan hukum, seperti penindakan terhadap pelaku korupsi dan pemberian sanksi pidana. Meskipun pendekatan ini penting, namun tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan korupsi secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan preventif yang lebih menekankan pada upaya pencegahan melalui pendidikan, khususnya pendidikan karakter.⁵

Pendidikan karakter menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun generasi yang memiliki integritas dan kesadaran moral yang tinggi. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap, nilai, dan

² Khairudin, dkk., *Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia* (2025), hlm. 2.

³ Zainudin Hasan, *Pendidikan Anti Korupsi* (2025), hlm. 9.

⁴ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana Khusus* (2026), hlm. 31.

⁵ Zainudin Hasan, *Pendidikan Anti Korupsi* (2025), hlm. 12.

perilaku individu. Dalam konteks antikorupsi, pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, serta keberanian dalam menolak segala bentuk praktik korupsi.⁶

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Mahasiswa tidak hanya dipersiapkan sebagai tenaga profesional, tetapi juga sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, integrasi pendidikan karakter dalam sistem pembelajaran di perguruan tinggi menjadi sangat penting dalam upaya membangun budaya antikorupsi.⁷

Selain itu, pendekatan pendidikan antikorupsi juga perlu disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan karakter dapat menjadi strategi yang efektif dalam menanamkan nilai antikorupsi secara lebih kontekstual dan membumi. Kearifan lokal merupakan sistem nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang mengandung prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, tanggung jawab, solidaritas, dan rasa malu. Nilai-nilai tersebut merupakan antitesis dari perilaku koruptif dan dapat menjadi landasan dalam membangun karakter individu.⁸

Sebagai contoh, dalam masyarakat Lampung dikenal konsep *Pi'il Pesenggiri* yang menjunjung tinggi harga diri, kehormatan, dan integritas dalam bertindak. Nilai ini dapat menjadi modal sosial yang kuat dalam membentuk perilaku antikorupsi, karena individu yang memiliki rasa malu dan kehormatan akan cenderung menghindari tindakan yang merugikan orang lain maupun negara. Dengan demikian, integrasi kearifan lokal dalam pendidikan karakter dapat memperkuat efektivitas pendidikan antikorupsi.⁹

Di sisi lain, implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi juga harus didukung oleh lingkungan akademik yang kondusif. Perguruan tinggi harus mampu menjadi contoh dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan. Dosen sebagai pendidik

⁶ Khairudin, dkk., *Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia* (2025), hlm. 87.

⁷ Khairudin, dkk., *Mereduksi Korupsi*, hlm. 75.

⁸ Zainudin Hasan, dkk., *Pendidikan Anti Korupsi Berkearifan Lokal* (2025), hlm. 1.

⁹ Khairudin, dkk., *Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia* (2025), hlm. 2.

memiliki peran penting sebagai teladan dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada mahasiswa. Tanpa adanya keteladanan, pendidikan karakter akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Lebih lanjut, pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi tidak hanya dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di kelas, tetapi juga melalui berbagai kegiatan non-akademik seperti seminar, diskusi, pelatihan, dan kampanye antikorupsi. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, pembangunan generasi antikorupsi melalui pendidikan karakter di perguruan tinggi merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah praktik korupsi di masa depan, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang berintegritas, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat, dalam mengimplementasikan pendidikan karakter sebagai bagian integral dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran pendidikan karakter dalam membangun generasi antikorupsi di perguruan tinggi?
2. Apa saja strategi yang dapat diterapkan untuk membangun generasi yang berintegritas dan anti korupsi?

LANDASAN TEORI

1. Teori Cost-Benefit Model

Teori ini mengemukakan bahwa korupsi terjadi ketika keuntungan yang diperoleh dari tindakan korupsi dianggap lebih besar dari pada biaya atau risiko yang harus ditanggung. Ini dikenal sebagai Nilai Manfaat Bersih Korupsi.³⁹ Makna rasional dalam teori ini merujuk pada perspektif pelaku korupsi yang berusaha mendapatkan keuntungan finansial yang besar tanpa harus menghadapi kerugian yang melebihi manfaat yang mereka peroleh. Berdasarkan teori ini, manusia dianggap sebagai individu yang rasional

dan penuh pertimbangan, yang akan bertindak berdasarkan perhitungan antara biaya dan manfaat. Ketika pelaku korupsi menyadari adanya peluang untuk melakukan tindakan korupsi dan mendapatkan keuntungan besar tanpa terdeteksi akibat pengendalian yang lemah, maka mereka cenderung akan mengambil keputusan untuk berkorupsi¹⁰.

2. Teori Bad Apple

Teori Bad Apple menjelaskan bahwa perilaku menyimpang, termasuk korupsi, berakar pada karakter individu yang buruk. Dalam perspektif ini, tindakan korupsi dipandang sebagai hasil dari kelemahan moral pribadi, seperti keserakahan, ketidakjujuran, egoisme, serta rendahnya rasa tanggung jawab. Individu yang memiliki karakter demikian cenderung lebih mudah tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan demi kepentingan pribadi.

Teori ini menekankan bahwa penyebab utama korupsi bukan hanya berasal dari sistem atau lingkungan, melainkan dari dalam diri individu itu sendiri. Dengan kata lain, meskipun seseorang berada dalam sistem yang baik, jika tidak memiliki integritas yang kuat, maka tetap berpotensi melakukan tindakan koruptif. Hal ini menunjukkan pentingnya pembentukan karakter sebagai fondasi utama dalam mencegah korupsi.

Pembentukan karakter individu umumnya dimulai sejak usia dini melalui proses sosialisasi dalam keluarga, pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Jika nilai-nilai tersebut tidak ditanamkan dengan baik, maka individu berpotensi tumbuh dengan karakter yang lemah dan rentan terhadap perilaku menyimpang.

Selain itu, lingkungan sosial juga turut memengaruhi pembentukan karakter individu. Interaksi dengan teman sebaya, budaya masyarakat, serta kebiasaan yang berkembang di lingkungan sekitar dapat memperkuat atau bahkan melemahkan nilai moral seseorang. Lingkungan yang permisif terhadap tindakan tidak jujur, misalnya, dapat mendorong individu untuk menganggap perilaku koruptif sebagai sesuatu yang wajar.

¹⁰ Zainudin Hasan, Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0 (Bandar Lampung, PUSAKA UBL, 2025), hlm. 37

Namun demikian, teori Bad Apple juga memiliki keterbatasan karena cenderung menitikberatkan pada faktor individu dan kurang memperhatikan pengaruh sistem atau struktur sosial. Dalam kenyataannya, korupsi sering kali terjadi karena adanya peluang, lemahnya pengawasan, serta sistem yang tidak transparan. Oleh karena itu, teori ini perlu dipadukan dengan pendekatan lain agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyebab korupsi. Meskipun demikian, teori Bad Apple tetap relevan dalam konteks pendidikan karakter, karena menegaskan pentingnya pembentukan integritas individu sebagai langkah awal dalam mencegah korupsi. Melalui pendidikan karakter yang kuat, diharapkan dapat terbentuk individu yang memiliki kesadaran moral tinggi, mampu mengendalikan diri, serta berkomitmen untuk menjunjung nilai kejujuran dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

3. Teori Clashing moral value theories (teori konflik nilai moral)

Menurut teori ini, korupsi muncul ketika terdapat pertentangan antara status individu dalam masyarakat dan posisinya sebagai pejabat publik atau penyelenggara negara. Kedua peran ini sering kali menciptakan dilema moral. Konflik ini timbul karena pejabat publik sering kali kesulitan untuk memisahkan kehidupan pribadinya dari tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas-tugas publik. Berdasarkan teori ini, tindakan korupsi tidak selalu dipicu oleh keserakahan, melainkan seringkali dilakukan untuk memberikan dukungan kepada teman atau keluarga sebagai wujud loyalitas. Dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki, seorang pejabat publik memiliki kemampuan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat menguntungkan orang-orang terdekatnya. Dalam rangka menunjukkan kesetiaan dan solidaritas, pejabat tersebut dapat terlibat dalam praktik korupsi untuk membantu keluarganya atau teman-temannya, yang dikenal dengan sebutan nepotisme

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan secara mendalam mengenai pembangunan generasi antikorupsi melalui pendidikan karakter di perguruan tinggi. Pendekatan ini dipilih

¹¹ Zainudin Hasan, Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0 (Bandar Lampung, PUSAKA UBL, 2025), hlm. 38

karena penelitian lebih menekankan pada analisis konsep, nilai, dan teori daripada data angka.¹²

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan dokumen ilmiah yang relevan. Sumber utama dalam penelitian ini berasal dari karya-karya ilmiah yang membahas pendidikan antikorupsi, hukum pidana khusus, dan pendidikan karakter.¹³

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyusun dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan karakter memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi antikorupsi, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, pembentukan karakter yang berlandaskan nilai-nilai antikorupsi menjadi suatu keharusan.

Korupsi yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan hanya terletak pada lemahnya sistem hukum, tetapi juga pada rendahnya integritas individu. Banyak kasus korupsi melibatkan pejabat publik yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, yang seharusnya memiliki kesadaran moral yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan formal tanpa disertai pendidikan karakter tidak cukup untuk mencegah perilaku koruptif. Dalam konteks ini, pendidikan karakter di perguruan tinggi harus diarahkan pada internalisasi nilai-nilai antikorupsi secara sistematis dan berkelanjutan. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan keberanian harus menjadi bagian dari proses pembelajaran, baik melalui kurikulum formal maupun kegiatan non-akademik.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 9.

¹³ Zainudin Hasan, *Pendidikan Anti Korupsi* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025).

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 186.

Pendidikan antikorupsi tidak hanya diajarkan sebagai mata kuliah, tetapi juga harus diimplementasikan dalam kehidupan kampus sehari-hari.

Selain itu, integrasi kearifan lokal dalam pendidikan karakter dapat menjadi strategi yang efektif dalam membangun kesadaran antikorupsi. Nilai-nilai budaya lokal yang mengandung prinsip moral dapat memperkuat internalisasi nilai antikorupsi karena lebih dekat dengan kehidupan mahasiswa. Misalnya, nilai Pi'il Pesenggiri yang menjunjung tinggi harga diri dan kehormatan dapat mendorong individu untuk menghindari perilaku koruptif.

Pendidikan karakter juga perlu didukung oleh lingkungan akademik yang kondusif. Perguruan tinggi harus menjadi contoh dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Dosen sebagai pendidik memiliki peran penting sebagai teladan dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada mahasiswa. Lebih lanjut, pendekatan pendidikan antikorupsi harus bersifat partisipatif dan kontekstual. Mahasiswa perlu dilibatkan secara aktif dalam berbagai kegiatan seperti diskusi, seminar, dan kampanye antikorupsi. Dengan demikian, mereka tidak hanya memahami konsep antikorupsi secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Dengan adanya pendidikan karakter yang terintegrasi dengan nilai-nilai antikorupsi, diharapkan dapat terbentuk generasi yang memiliki integritas tinggi dan mampu menjadi agen perubahan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.¹⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membangun generasi antikorupsi di lingkungan perguruan tinggi. Pendidikan karakter tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer nilai moral, tetapi juga sebagai proses pembentukan sikap dan perilaku mahasiswa agar memiliki integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap nilai-nilai antikorupsi. Permasalahan korupsi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem hukum dan pengawasan, tetapi juga oleh rendahnya

¹⁵ Zainudin Hasan, Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0 (Bandar Lampung, PUSAKA UBL, 2025), hlm. 39

integritas individu. Fakta bahwa banyak pelaku korupsi berasal dari kalangan berpendidikan menunjukkan bahwa pendidikan formal belum sepenuhnya mampu membentuk karakter yang kuat. Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi solusi penting dalam upaya pencegahan korupsi secara jangka panjang. Implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi perlu dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pendidikan antikorupsi tidak cukup hanya diajarkan dalam bentuk teori atau mata kuliah, tetapi harus diinternalisasikan dalam seluruh aktivitas akademik dan kehidupan kampus. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, kerja keras, dan keberanian harus menjadi bagian dari budaya kampus yang diterapkan secara nyata oleh seluruh civitas akademika. Selain itu, integrasi kearifan lokal dalam pendidikan karakter terbukti dapat memperkuat efektivitas pembentukan sikap antikorupsi.

Nilai-nilai budaya seperti kehormatan, rasa malu, dan tanggung jawab sosial, sebagaimana tercermin dalam konsep Pi'il Pesenggiri, dapat menjadi landasan moral yang kuat dalam mencegah perilaku koruptif. Pendekatan ini membuat pendidikan antikorupsi lebih kontekstual dan mudah diterima oleh mahasiswa. Keberhasilan pendidikan karakter juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan akademik yang kondusif serta keteladanan dosen sebagai pendidik. Perguruan tinggi harus mampu menjadi contoh dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, keterlibatan aktif mahasiswa dalam berbagai kegiatan antikorupsi juga menjadi faktor penting dalam menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pembangunan generasi antikorupsi melalui pendidikan karakter di perguruan tinggi merupakan langkah strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga berintegritas tinggi. Upaya ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang berperan sebagai agen perubahan dalam menciptakan budaya antikorupsi serta mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun generasi antikorupsi melalui penguatan pendidikan karakter. Oleh karena itu, kampus diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai

antikorupsi secara sistematis ke dalam kurikulum, baik melalui mata kuliah khusus maupun melalui internalisasi nilai dalam setiap proses pembelajaran. Selain itu, dosen sebagai pendidik diharapkan tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga menjadi teladan dalam menerapkan nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Lingkungan akademik yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas juga perlu diciptakan agar mahasiswa dapat melihat dan merasakan langsung praktik nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kampus.

Di sisi lain, mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan mampu mengembangkan sikap kritis, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, serta aktif terlibat dalam berbagai kegiatan antikorupsi seperti seminar, diskusi, dan kampanye edukatif. Pemerintah juga diharapkan memberikan dukungan kebijakan yang lebih kuat melalui penyediaan kurikulum terstandar dan program edukasi berkelanjutan guna memperkuat implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Sementara itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan pendidikan karakter antikorupsi serta mengembangkan model pembelajaran yang lebih inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Cressey, Donald R. *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. New York: Free Press, 1953.
- Hasan, Zainudin. *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*. Bandar Lampung: UBL Press, 2025.
- Hasan, Zainudin. *Hukum Pidana Khusus*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026.
- Hasan, Zainudin, Tami Rusli, dan Nuris Sanida. *Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal*. Bandar Lampung: UBL Press, 2025.
- Khairudin, Zainudin Hasan, Malik, dan Yanuarius Yanu Dharmawan. *Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia: Perspektif Agency Theory*. Banyumas: PT. Ganesha Kreasi Semesta, 2025.

- Klitgaard, Robert. *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press, 1988.
- Lickona, Thomas. *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books, 1991.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Transparency International. *Corruption Perceptions Index Report*. Berlin: Transparency International, 2023.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Penguatan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud, 2020.
- Arifin, Zainal. *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Suyanto. *Pendidikan Karakter: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.